

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan Karya Tugas Akhir yang berjudul **“KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI PENGENDALI DAN ATAU PROSESOR DATA PRIBADI (Analisis Komparatif Pengaturan Internasional, Pengaturan Domestik Negara Asia, Hukum Positif Indonesia dan RUU PDP Indonesia)”** dengan sangat baik dan lancar. Karya Tugas Akhir ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, Karya Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan Karya Tugas Akhir ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan sebagian besar dari waktu,

tenaga, maupun pikirannya untuk memberikan bimbingan serta bantuan yang diperlukan untuk menyelesaikan Karya Tugas Akhir ini;

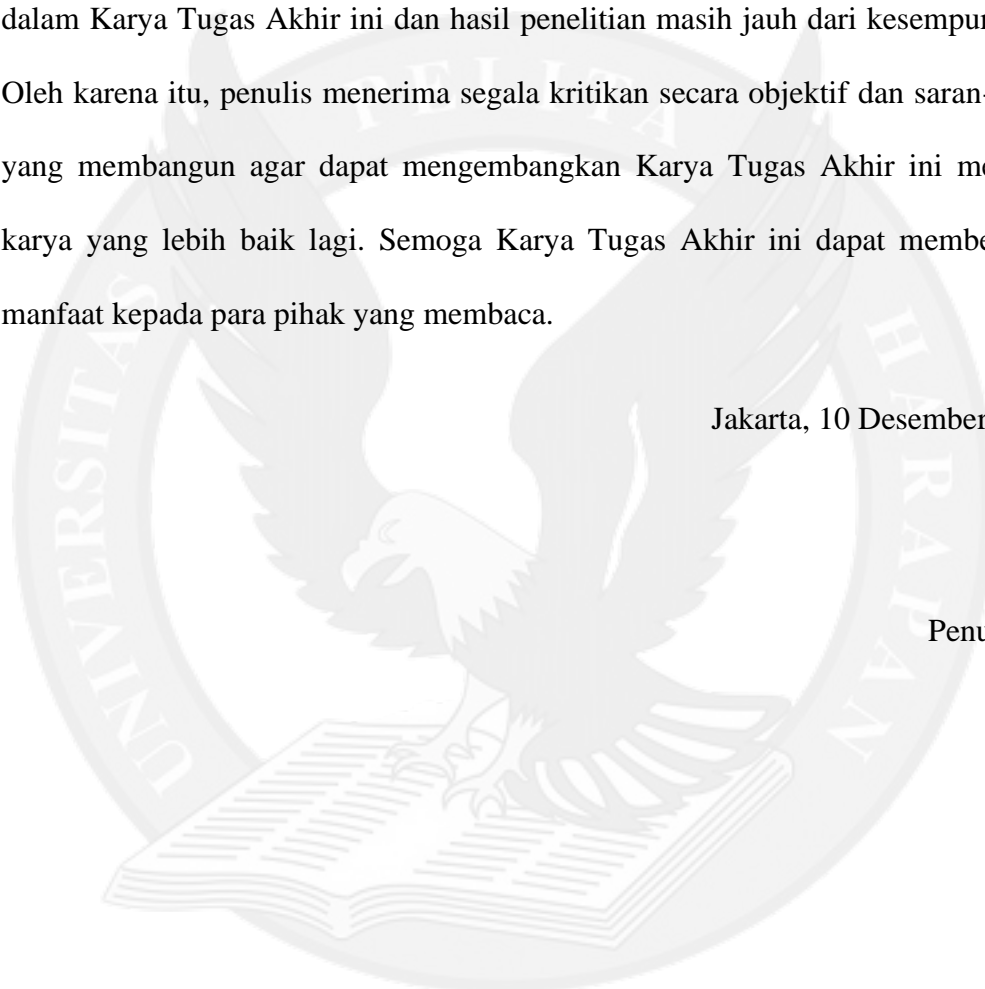
4. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama proses pembelajaran serta penyusunan Karya Tugas Akhir di Universitas Pelita Harapan;
5. Seluruh pihak dan staf Fakultas Hukum terutama Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis selama menjalani proses-proses akademik dan administratif dalam menyelesaikan Karya Tugas Akhir ini;
6. Ibu Lisa, S.E. selaku orang tua penulis dan Billy Koswara, S. Kom. selaku adik kandung penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, doa, maupun motivasi baik berupa materi maupun secara emosional dan dukungan-dukungan lainnya selama menyelesaikan Karya Tugas Akhir;
7. Ibu Meidini Hutagalung dan seluruh rekan-rekan di PT Trimars Perkasa Abadi (Investindo) yang sudah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses menyelesaikan Karya Tugas Akhir;
8. Teman-teman dari Batch 47 MH UPH di Universitas Pelita Harapan yang sudah bersama-sama menjalani proses perkuliahan selama 1,5 tahun secara daring;
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah turut memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Tugas Akhir ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas semua kebaikan, dukungan, bantuan, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis kepada pihak-pihak yang telah disebutkan di atas yang tidak dapat penulis balas satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Karya Tugas Akhir ini dan hasil penelitian masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritikan secara objektif dan saran-saran yang membangun agar dapat mengembangkan Karya Tugas Akhir ini menjadi karya yang lebih baik lagi. Semoga Karya Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang membaca.

Jakarta, 10 Desember 2021

Penulis



DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Pokok Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Teori dan Asas Hukum	17
2.1.1.1 Teori Keadilan Bermartabat (<i>Dignified Justice Theory</i>)	17
2.1.1.1.1 Teori Keadilan Bermanfaat dan Data Pribadi.....	19
2.1.1.1.1.1 Asas Perlindungan.....	20
2.1.1.1.1.2 Asas Kepentingan Umum	20
2.1.1.1.1.3 Asas Keseimbangan	20
2.1.1.1.1.4 Asas Pertanggungjawaban	20
2.1.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	21
2.1.2 Tinjauan Umum tentang Privasi	22
2.1.2.1 Privasi Sebagai Hak Dasar Manusia.....	22
2.1.2.2 Ruang Lingkup Privasi	24
2.1.2.3 Privasi Dalam Konteks Data Pribadi	25

2.1.3	Penyalahgunaan Data.....	26
2.1.3.1	Pengumpulan dan Penggunaan Data.....	26
2.1.3.2	Kebocoran Data (<i>Data Leakage</i>)	28
2.1.3.3	Pelanggaran Data (<i>Data Breach</i>).....	28
2.1.4	Para Pihak yang Terlibat dalam Konteks Perlindungan Data Pribadi	30
2.1.5	Penyalahgunaan Data Konsumen	31
2.1.6	Penyalahgunaan Data Konsumen <i>E-Commerce</i>	32
2.1.6.1	Jenis-Jenis Informasi yang Dikumpulkan Secara Daring	32
2.1.6.2	Pelanggaran Keamanan dan Pelanggaran Data	33
2.1.6.3	Penyalahgunaan Data Konsumen <i>E-Commerce</i> oleh Pihak Ketiga	35
2.1.7	Tinjauan Umum Prinsip-Prinsip Terkait Pemrosesan Data Pribadi	39
2.1.8	Tinjauan Umum Hak-Hak Subjek Data Pribadi	40
2.1.8.1	Hak Atas Informasi (<i>Right to Information</i>)	40
2.1.8.2	Hak Akses (<i>Right to Access</i>).....	41
2.1.8.3	Hak Memperbaiki (<i>Right to Rectify</i>).....	42
2.1.8.4	Hak Memblokir (<i>Right to Restriction</i> atau <i>Block of Processing</i>)	42
2.1.8.5	Hak Menghapus (<i>Right to Erasure</i>).....	43
2.1.8.6	Hak Menolak (<i>Right to Object</i>)	43
2.1.8.7	Hak Portabilitas Data (<i>Right to Data Portability</i>)	43
2.1.8.8	Hak sehubungan dengan <i>Automated Decision Making</i> dan <i>Profiling</i>	44
2.1.8.9	Hak untuk mendapatkan Pemulihan Yang Efektif (<i>Effective Remedy</i>)	44
2.1.8.10	Hak untuk mendapatkan Kompensasi dan Pertanggungjawaban (<i>Right to compensation and liability</i>)	44
2.1.9	Tinjauan Umum Penyelenggaraan Sistem Elektronik	44
2.1.10	Tinjauan Umum Penyelenggara Sistem Elektronik.....	45
2.1.11	Tinjauan Umum Pengendali Data Pribadi	48
2.1.12	Tinjauan Umum Prosesor Data Pribadi	48
2.1.13	Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi	49
2.1.14	Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi.....	50
2.1.14.1	Landasan Filosofis	50

2.1.14.2	Landasan Sosiologis	51
2.1.14.3	Landasan Yuridis	51
2.1.15	Tinjauan Umum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi: Kategori <i>Hard Law</i>	52
2.1.15.1	Tinjauan Umum EU GDPR	52
2.1.16	Tinjauan Umum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi: Kategori <i>Soft Law</i>	53
2.1.16.1	Tinjauan Umum OECD Privacy Guidelines 1980.....	53
2.1.17	Pengaturan Internasional Berdasarkan Praktik dan Instrumen Perlindungan Data Pribadi di Negara-Negara Asia	54
2.1.17.1	Tinjauan Umum <i>Singapore Personal Data Protection Act 2012</i> 54	
2.1.17.2	Tinjauan Umum <i>Japan Personal Information Protection Act 2003</i> yang Disempurnakan Tahun 2020	55
2.1.17.3	Tinjauan Umum Philippines Data Privacy Act 2012.....	56
2.1.18	Tinjauan Umum Hukum Positif terkait Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	57
2.1.19	Tinjauan Umum RUU PDP	59
2.1.19.1	Initiatif Penyusunan RUU PDP	61
2.1.19.2	Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi.....	61
2.1.19.3	Progres Pembahasan RUU PDP di DPR.....	62
2.2	Landasan Konseptual	62
BAB III METODE PENELITIAN		67
3.1	Pengertian Metode Penelitian.....	67
3.2	Jenis Penelitian	68
3.3	Sumber dan Sifat Data Penelitian.....	68
3.3.1	Bahan Hukum Primer	68
3.3.2	Bahan Hukum Sekunder	69
3.3.3	Bahan Hukum Tersier.....	70
3.4	Pendekatan Penelitian.....	70
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS		75
4.1	Pengaturan tentang Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Berdasarkan EU GDPR	75
4.1.1	Definisi Pengendali Data	75
4.1.2	Definisi Prosesor Data	75

4.1.3	Definisi Subjek Data.....	75
4.1.4	Hak-Hak Subjek Data.....	76
4.1.5	Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengendali Data.....	81
4.1.5.1	Pengendali Data Bersama (<i>Joint Controllers</i>).....	82
4.1.6	Kewajiban dan Tanggung Jawab Prosesor Data.....	83
4.1.7	Perekaman Kegiatan Pemrosesan Data.....	85
4.1.8	Keamanan Pemrosesan Data.....	85
4.1.8	Pemberitahuan mengenai Pelanggaran Data Pribadi kepada Otoritas Pengawas	85
4.1.9	Pemberitahuan mengenai Pelanggaran Data Pribadi kepada Subjek Data	87
4.1.10	Penilaian Dampak Perlindungan Data	87
4.1.11	Konsultasi Terlebih Dahulu	88
4.1.12	Pengenaan Denda Administratif dan Penalti Lainnya	88
4.2	Pengaturan tentang Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Berdasarkan <i>OECD Privacy Guidelines 1980</i>	90
4.2.1	Definisi Pengendali Data	90
4.2.2	Konsep “data pribadi” dan “subjek data” dalam <i>OECD Guidelines</i>	90
4.2.3	Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengendali Data.....	91
4.2.3.1	Prinsip Akuntabilitas.....	91
4.2.3.2	Aliran Bebas Data dan Batasan yang Sah.....	92
4.2.3.3	Pemberitahuan Pelanggaran Keamanan Data	92
4.2.4	Kewajiban dan Tanggung Jawab “Agen”	92
4.2.5	Subjek Data.....	93
4.2.5.1	Prinsip Pembatasan Pengumpulan Data.....	93
4.2.5.2	Prinsip Pembatasan Penggunaan.....	93
4.2.5.3	Prinsip Spesifikasi Tujuan	93
4.2.5.4	Prinsip Partisipasi Individual	93
4.2.6	Sanksi, Denda, atau Hukuman.....	93
4.3	Pengaturan tentang Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Berdasarkan <i>Personal Data Protection Act 2012</i> jo. <i>Personal Data Protection Act 2020 Singapore</i>	94
4.3.1	Definisi Pengendali Data	94
4.3.2	Definisi Pemroses Data.....	95
4.3.3	Definisi Subjek Data.....	95

4.3.4	Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengendali Data atau <i>Organisation</i> dan <i>Data Intermediary</i>	95
4.3.4.1	Pemberitahuan tujuan.....	97
4.3.4.2	Akses ke data pribadi.....	97
4.3.4.3	Pembetulan data pribadi.....	98
4.3.4.4	Keakuratan data pribadi.....	98
4.3.4.5	Perlindungan data pribadi.....	98
4.3.4.6	Retensi data pribadi.....	98
4.3.4.7	Pemberitahuan pelanggaran data.....	98
4.3.5	Hak-hak Subjek Data atau <i>Individual</i>	99
4.3.6	Sanksi, Denda, Hukuman.....	99
4.4	Pengaturan tentang Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Berdasarkan <i>Japan Personal Information Protection Act 2003</i> yang Disempurnakan Tahun 2020.....	100
4.4.1	Definisi pengendali data.....	100
4.4.2	Definisi Subjek Data.....	101
4.4.3	Kewajiban dan tanggung jawab personal information handling business operator 101	
4.4.4	Hak-hak Subjek Data.....	102
4.4.5	Sanksi, Denda, Hukuman.....	103
4.5	Pengaturan tentang Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Berdasarkan <i>Philippines Data Privacy Act 2012</i>	104
4.5.1	Definisi Pengendali Data.....	104
4.5.2	Definisi Prosesor Data.....	104
4.5.3	Definisi Subjek Data.....	105
4.5.4	Pembedaan <i>personal information</i> dengan <i>sensitive personal information</i>	105
4.5.5	Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengendali Data.....	106
4.5.6	Kewajiban dan Tanggung Jawab Prosesor Data.....	107
4.5.7	Hak-hak Subjek Data.....	107
4.5.8	Sanksi, Denda, Hukuman.....	108
4.6	Pengaturan di Indonesia.....	108
4.6.1	<i>Ius Constitutum</i>	108
4.6.1.1	Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	108

4.6.1.1.1	Secara Umum	108
4.6.1.1.2	Sehubungan Dengan Aspek Perlindungan Data Pribadi ...	112
4.6.2	<i>Ius Constituendum</i>	119
4.6.2.1	Definisi Data Pribadi Menurut RUU PDP.....	119
4.6.2.2	Definisi Pengendali Data Pribadi Menurut RUU PDP	120
4.6.2.3	Definisi Prosesor Data Pribadi Menurut RUU PDP	120
4.6.2.4	Definisi Pemilik Data Pribadi Menurut RUU PDP.....	120
4.6.2.5	Pengaturan Umum tentang Data Pribadi dalam RUU PDP..	120
4.6.2.6	Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengendali Data Pribadi Menurut RUU PDP	122
4.6.2.7	Kewajiban dan Tanggung Jawab Prosesor Data Pribadi Menurut RUU PDP	123
4.6.2.8	Pengaturan Sanksi Menurut RUU PDP	124
4.6.3	Kecukupan Pengaturan Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Sebagai Pengendali dan/atau Prosesor Data Pribadi	125
4.6.3.1	Ditinjau Dari Teori Keadilan Bermartabat	127
4.6.3.2	Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.....	129
4.6.4	Implementasi dan Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	132
4.6.4.1	Kasus Kebocoran Data di Indonesia	132
4.6.4.2	Dinamika Implementasi Hukum Positif Terkait Perlindungan Data Pribadi dan Tingkat Urgensi Pengesahan RUU PDP	135
4.6.4.3	Peran <i>Data Protection Officer</i> dalam Pelaksanaan Kewajiban dan Tanggung Jawab PSE sebagai Pengendali dan/atau Prosesor Data Pribadi	138
4.7	Identifikasi Kekurangan RUU PDP terkait Pengaturan Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengendali Data dan Prosesor Data	140
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		145
5.1	Kesimpulan.....	145
5.2	Saran	146

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN